

## BAB V

### KESIMPULAN

Dewasa ini, aktivitas diplomasi telah meningkat pesat seiring dengan semakin beragamnya isu-isu dalam hubungan internasional. Hubungan Internasional tidak lagi dilihat sebagai hubungan antar negara, akan tetapi juga meliputi hubungan masyarakat Internasional.

Dengan demikian diplomasi tradisional, atau yang dikenal dengan istilah "*First track Diplomacy*", yang hanya melibatkan peran pemerintah dalam menjalankan misi diplomasi. Tentu saja tidak akan efektif dalam rangka menyampaikan pesan-pesan diplomasi terhadap suatu negara. Oleh karena itu, aktivitas diplomasi publik yang melibatkan peran serta publik akan sangat dibutuhkan dalam rangka melengkapi aktivitas diplomasi tradisional. Alasan utama keterlibatan publik ini didasarkan pada asumsi yang cukup sederhana, yaitu pemerintah tidak selalu dapat menjawab berbagai tantangan dalam isu-isu diplomasi yang kini semakin kompleks, terlebih lagi sifat khas yang melekat dari pemerintah adalah sangat kaku dan sarat dengan nuansa sistem birokratis yang rumit.

Melalui peningkatan aktivitas diplomasi publik, pemerintah berharap bahwa upaya diplomasi akan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas dan besar pada masyarakat internasional. Di samping itu, pemerintah pun berharap keterlibatan publik ini dapat membuka jalan bagi negosiasi yang

dilakukan wakil-wakil pemerintah, sekaligus dapat memberikan masukan dan cara pandang yang berbeda dalam memandang suatu masalah.

Peran aktif Indonesia dalam penyelenggaraan *Interfaith Dialogue* merupakan sebuah wujud partisipasi didalam usaha untuk menangani aksi terorisme. Citra positif terhadap gambaran mengenai kehidupan dinamika politik akan memberikan gambaran yang positif bagi dunia untuk meningkatkan kerja sama antar negara. Fokus dialog bukan semata-mata hanya untuk saling memahami kebudayaan yang berbeda. Lebih mendalam ialah terciptanya sebuah kepercayaan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan kerjasama semua aspek politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Penyelenggaraan *Interfaith Dialogue* ini juga merupakan langkah pemerintah Indonesia dalam melakukan pendekatan terhadap Australia, dimana langkah ini berhasil dengan baik sehingga menimbulkan dampak yang positif bagi perubahan hubungan antar kedua negara kearah yang lebih baik. Dimana berbagai kerjasama, perjanjian dan pernyataan bersama tentang berbagai hal telah dilakukan Indonesia dan Australia dalam kurun waktu tahun 2007-2010 ini.

Selain itu pada masa Presiden SBY sekarang ini, peran Indonesia sebagai mediator cenderung meningkat dan memiliki kredibilitas sebagai mediator perdamaian, karena Indonesia dinilai mampu menyelesaikan konflik internal di dalam negeri secara damai seperti di Ambon, Poso dan Aceh. Sampai saat ini masih ada konflik internal di beberapa negara yang belum dapat diselesaikan dengan baik seperti di Sudan, di Palestina (Hamas dengan Al Fatah), di Irak (Suni

dengan Syiah). Indonesia dengan kredibilitasnya mampu menyelesaikan masalah dalam negeri, kiranya diharapkan dapat memediasi penyelesaian permasalahan di negaranegara Timur Tengah tersebut. Tetapi tentunya hal itu harus diupayakan dengan terus menerus.

Indonesia tahun lalu mengundang tokoh-tokoh Hamas dan Al-Fatah ke Indonesia dan menyelenggarakan Konferensi Suni Syiah di Bogor, tetapi itu tidak dilanjutkan lagi. Jika kita ingin serius dalam memainkan peran di Timur Tengah sebagai peace maker, maka hal itu seharusnya merupakan bagian integral politik luar negeri Indonesia.

Secara konvensional dan tradisional, hal itu juga sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu dimana Indonesia dalam politik luar negerinya yang bebas dan aktif turut serta menciptakan perdamaian dunia. Sekarang ini ada keinginan dari Pemerintah untuk menjadi peace maker di beberapa negara itu, dan semua itu dapat direalisasikan apabila dilakukan secara terprogram dan tersistem, tidak sporadik.

Indonesia juga dapat berperan sebagai jembatan antara Timur dengan Barat atau Dunia Islam dengan Barat. Sejak peristiwa 11 September, dunia Barat melihat Islam dengan kaca mata yang tidak acceptable bagi dunia muslim, yaitu melalui pendekatan konfrontatif. Dalam hal ini Indonesia dapat memainkan peran sebagai penengah, karena politik luar negeri Indonesia berbasis pada politik jalan tengah. Indonesia tidak dikenal sebagai negara pro AS walaupun mempunyai

hubungan baik dengan AS dan Uni Eropa dan di sisi lain Indonesia juga mempunyai kredibilitas di dunia dan negaranegara Islam.

Tinggal bagaimana sekarang Indonesia merevitalisasi pencapaian yang pernah dilakukan seperti pada saat menjadi ketua Gerakan Non Blok. Dan sekarang ini sudah ada political will dari kepemimpinan saat ini untuk memainkan perannya dan untuk itu diselenggarakan kerangka yang baik serta program yang